

# UMAT MINORITAS DALAM PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA: Menyasar Penganut Agama Budha di Kota Jayapura Provinsi Papua

## *Minority People on Ministry of Religious Affairs Services: Investigating the Buddhist Followers in Jayapura, Papua Province*

*Abd. Kadir R*

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar  
Email: kadirrahman1957@gmail.com

Naskah diterima tanggal 17 Januari 2014. Naskah direvisi tanggal 1 Maret 2014. Naskah disetujui tanggal 14 April 2014

### **Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peran Kementerian Agama Kota Jayapura dalam melakukan pelayanan terhadap penganut agama minoritas, salah satu diantaranya adalah penganut agama Buddha. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tehnik Penjaringan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kota Jayapura melakukan pelayanan terhadap penganut agama Buddha dalam bentuk bantuan pembangunan dan renovasi rumah ibadah; pelaksanaan pendidikan; dan penyiaran agama.

**Kata kunci:** pelayanan, kementerian Agama, Budha

### **Abstract**

*This research aimed at identifying to what extent the role of Ministry of Religious Affairs in Jayapura in carrying out the services to the minority belief groups; one of them is Buddhist followers. The research method was qualitative method which collected the data by conducting deep interview and document study. The findings show that Ministry of Religious Affairs in Jayapura carried out the services to the Buddhist followers in the forms of building and renovating worship places, giving education and spreading religion.*

**Keywords:** services, ministry of religious affairs services, buddhist

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan PP Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 62 Tahun 2005 pasal 63, Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan sebagai pemenuhan hak beragama warga negara. Fasilitas dan pelayanan itu dapat berupa regulasi,

kebijakan dan program pembangunan bidang agama.

Terkait dengan itu, penelitian ini mencoba menelusuri pelayanan Kementerian Agama terhadap penganut agama yang dianggap minoritas. Salah satu agama yang dianggap minoritas jika dilihat dari segi jumlah penganutnya adalah agama Buddha. Sebagai gambaran jumlah penganut agama Buddha yang tercatat di Indonesia menurut data BPS tahun 2010 sebanyak 1.703.254 orang (0,72%) dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. Jumlah penganut agama Buddha ini tersebar pada 33 provinsi yang ada di Indonesia, dan jumlah yang paling besar terdapat di Provinsi DKI Jakarta (<http://buddhazine.com/2011/12/23/bps-jumlah->

umat-buddha-di-indonesia-meningkat, diakses 20/5/2013).

Kemudian berdasarkan data tahun 2012, jumlah penganut agama Buddha yang tercatat pada Kementerian Agama Kota Jayapura sebanyak 1863 orang atau 0,68% dari jumlah penduduk Kota Jayapura.

Meskipun termasuk minoritas, agama Buddha di Indonesia termasuk yang diberikan pelayanan oleh Kementerian Agama. Sejak tahun 2006 melalui Penpres No 63 tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 yang kemudian ditindak lanjuti dengan PMA No 3 tahun 2006 tertanggal 24 Januari 2006, resmiah berdiri Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang sebelumnya sejak tahun 1966 tergabung dengan agama Hindu dengan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha ([www.bimas.buddha.kemenag.go.id](http://www.bimas.buddha.kemenag.go.id), diakses tanggal 1 Mei 2013).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2002, maka pada Kantor Departemen Agama Kota Jayapura, dibentuk struktur Penyelenggara Masyarakat Hindu Buddha. Kemudian pada tahun 2009 dipisah menjadi penyelenggara bimas Buddha tersendiri.

Sebenarnya Kementerian Agama sendiri sudah bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, seperti tertuang dalam RPJMN 2010-2014 pada point ketiga, dan Renstra Kemenag Kota Jayapura 2010-2014 point b, yakni "Peningkatan pelayanan bagi umat beragama untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama bagi masyarakat. Pelayanan keagamaan pada hakikatnya merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas keberagaman masyarakat". Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penelitian ini menelusuri lebih jauh terkait pelayanan Kementerian Agama Kota Jayapura terhadap penganut agama Buddha.

Permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian adalah: 1) bagaimana kualitas pelayanan Kementerian Agama Kota Jayapura terhadap penganut agama Buddha? 2) faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Kementerian Agama Kota Jayapura. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Kementerian Agama Kota Jayapura terhadap penganut agama Buddha di Kota Jayapura. Dan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan Kementerian Agama Kota Jayapura. Manfaat penelitian ini adalah secara

*praktis*, hasil penelitian ini dapat memberikan output mengenai pelayanan agama Buddha, serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghilangkan kesan diskriminasi. Secara *internal*, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Penelitian terkait agama Buddha di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Telah banyak penelitian mengenai agama tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah sejarawan (baik yang berasal dari Indonesia maupun peneliti asing), tetapi mereka kerap kali mengkhususkan kepada sejarah masuknya dan perkembangan agama Buddha di Indonesia.

Dalam lingkungan Kementerian Agama sendiri, penelitian menyangkut agama Buddha pernah dilakukan, namun pada umumnya lebih bersifat pendataan atau pengumpulan data sekunder. Misalnya, Mubarak (1994) tentang rangkuman Peta Keagamaan di 10 provinsi di Indonesia". Yang dilakukan Mubarak sebenarnya lebih berupa database, yakni mengumpulkan data-data sekunder sekaligus pemetaan pemeluk agama dan fasilitas keagamaan di Indonesia. Atau, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang melakukan survey pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, Khonghucu dengan memfokuskan pada peta kelembagaan pendidikan keagamaan agama-agama tersebut di 33 provinsi di Indonesia (lihat [http://balitbang.diklat.kemenag.go.id.php?option=com\\_content&View=article&id=166:survey-pendidikan-keagamaan-kristen-katolik-hindu-budha-dan-khonghucu-&catid=61:pendidikan-keagamaan&Itemid=123](http://balitbang.diklat.kemenag.go.id.php?option=com_content&View=article&id=166:survey-pendidikan-keagamaan-kristen-katolik-hindu-budha-dan-khonghucu-&catid=61:pendidikan-keagamaan&Itemid=123), diakses 26 Desember 2012).

Penelitian lainnya yang hampir sama namun dalam kasus yang lain yang dilakukan oleh tim peneliti kehidupan Litbang agama Makassar yang meneliti tentang pelayanan Kementerian Agama terhadap penganut agama Konghucu. Dalam penelitian tersebut ditemukan di beberapa kantor Kementerian Agama penganut agama Konghucu belum mendapatkan pelayanan dengan baik seperti belum terdaftar sebagai penganut salah satu agama, dan masih disamakan dengan penganut agama Buddha.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik

berbentuk barang maupun jasa publik. Pelayanan publik ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia pelayanan publik sering juga diartikan sebagai public servis (Ratminto dan Atik SP, 2007:4).

Pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Bab I pasal 1, adalah: "Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Selanjutnya, yang melaksanakan pelayanan publik adalah instansi negara, seperti yang diterangkan pada pasal 2, yakni: "penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang apakah mereka itu memeluk agama dominan atau agama minoritas, semuanya berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Namun, disini bukan berarti pelayanan itu adalah bentuk pelayanan asal-asalan. Melainkan, pelayanan secara holistik sesuai tugas dan fungsinya yang memang bekerja dan bertugas untuk melayani masyarakat secara sungguh-sungguh. Karena itu, terkait dengan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik yaitu *environmental service* (pelayanan lingkungan), *development service* (pelayanan pengembangan), dan *protective service* (perlindungan). Adapun syarat dari pelayanan publik sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi: Pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas: Dalam pelayanan public harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Kondisional: Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

- d. Partisipatif: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemberian penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (lihat Badrun, 2008:6).

Fitsimmons (dalam Sinambela, dkk, 2008:7) mengatakan bahwa ada lima indikator yang biasa dipakai untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik, yaitu; a) *realibility*, pemberian pelayanan secara tepat sasaran; b) *tangibles*, kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai; c) *responsiveness*; pelayanan secara tepat/responsive; d) *assurance*; perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan e) *emphaty*; kemauan untuk memahami dan mengerti keinginan dan kebutuhan konsumen.

Yang tak kalah pentingnya adalah input, proses, dan out put dalam bentuk pelayanan tersebut. Mengapa demikian? karena ketiga bagian sistem ini saling melengkapi satu sama lain. Maksudnya, input merupakan prasyarat terjadinya proses pelayanan sedangkan out put adalah apa hasil yang telah dicapai dari proses tersebut. Dalam hal ini, input berupa sumber daya, perangkat lunak, dan harapan-harapan. Sementara proses dimaksudkan sebagai "berubahnya sesuatu menjadi yang lain". Terkait pelayanan keagamaan, proses antara lain berupa pengambilan keputusan dan pengelolaan kelembagaan instansi Kemenag. Intinya proses adalah rancangan semula dengan implementasinya. Sedangkan output merupakan kinerja yang dihasilkan berupa pelayanan terhadap aktivitas keagamaan. Output menunjukkan hasil nyata pelayanan sesuai sasaran yang diharapkan (Badrun, dkk, 2008:6-7).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang, meliputi proses perencanaan (pembuatan desain operasional), pengumpulan data dilokasi penelitian, analisis data, pembuatan laporan. Adapun lokasi penelitian adalah Kota Jayapura Provinsi Papua. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposif,

yakni memilih informan yang berkaitan dengan tema penelitian, diantaranya pejabat terkait di kantor Kemenag Kota Jayapura, tokoh agama Buddha, pengurus vihara, dan tokoh masyarakat lainnya.

Observasi dilakukan untuk mengamati kehidupan keagamaan masyarakat Buddha, kondisi atau tempat pelayanan keagamaan, petugas dalam melayani masyarakat, serta proses pelayanannya. Sedangkan data sekunder diperoleh lembaga pemerintah yang berkaitan dengan data kependudukan dan data umat Buddha, dan lain-lain. Kemudian analisis penelitian ini tidak hanya dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dideskripsikan, tetapi sedapat mungkin memberi penjelasan obyek penelitian (Moleong, 2000:36).

**PEMBAHASAN**  
**Kehidupan Keagamaan**

Data kantor Kemenag Kota Jayapura, mayoritas penduduk Kota Jayapura beragama Kristen, yaitu 123.773 jiwa atau 42,18% dari total penduduk. selanjutnya beragama Islam berjumlah 96.460 jiwa atau 32,87%, penganut Katolik berjumlah 69.754 jiwa atau 23,77%, sedangkan untuk penganut Hindu dan Buddha masing-masing 1.586 jiwa dan 1.863 jiwa atau 0,54% dan 0,63% dari total penduduk Kota Jayapura.

Adapun distribusi penduduk berdasarkan penganut agama pada setiap distrik di Kota Jayapura pada tahun 2011, lihat tabel 1:

Tabel 1 Jumlah Pemeluk Agama Berdasarkan Distrik

No	Nama Distrik	Jumlah Umat Beragama				
		Kristen	Katolik	Islam	Hindu	Budha
1	Muara tami	11.337	3.397	5.677	-	6
2	Abepura	22.032	15.329	19.741	590	362
3	Heram	14.182	5.849	9.428	263	89
4	Jayapura Selatan	32.536	8.743	32.503	276	720
5	Jayapura Utara	40.083	12.243	29.111	457	686
	Jumlah	120.170	45.561	96.460	1.586	1.863

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura 2011

Untuk sarana peribadatan yang tersedia bagi umat beragama di Kota Jayapura berjumlah 488 tempat ibadah, terdiri atas 270 gereja Kristen, 13 gereja Katolik dan 45 kapel, untuk umat Islam terdapat 146 mesjid dan 10 mushalla, untuk penganut Hindu dan Buddha masing-masing 1 pura dan 3 vihara.

Untuk pembinaan kehidupan keagamaan di

Kota Jayapura, terdapat 737 rohaniawan, yang terdiri atas 401 rohaniawan Islam, 274 rohaniawan Kristen, 50 rohaniawan Katolik serta rohaniawan Hindu dan Buddha masing-masing 6 orang. Untuk penyuluh agama yang aktif dalam lingkungan Kementerian Agama Kota Jayapura tercatat 100 penyuluh agama Islam, 150 penyuluh agama Kristen, 155 penyuluh agama Katolik, 16 penyuluh agama Hindu, dan 12 penyuluh agama Buddha, total penyuluh agama sebanyak 439 orang.

**Sejarah dan Perkembangan Agama Buddha di Kota Jayapura**

Mengenai sejarah mulai masuknya agama Buddha di Kota Jayapura, tidak diperoleh data yang pasti. Namun menurut TS Haryanto, yang menjabat penyelenggara pembimas agama Buddha pada kantor Kemenag Kota Jayapura menyatakan bahwa agama Buddha diperkirakan sudah ada pada zaman Belanda di Papua.

Pada tahun 80-an beberapa umat Buddha dari luar melakukan imigrasi ke Kota Jayapura, seperti dari pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertambahan penganut agama Buddha tersebut terjadi dari tahun ketahun. Melihat perkembangan penganut agama Buddha dari tahun ke tahun, namun persoalan yang dihadapi karena belum mempunyai rumah ibadah untuk melakukan kebaktian. Melihat kenyataan tersebut, maka salah seorang pengusaha Buddhis yakni pimpinan Toko Bintang Mas meminjami suatu ruangan yang terletak di jalan matahari untuk dijadikan tempat ibadah sebagai cetiyah (vihara kecil), dan semenjak adanya cetiyah (tempat ibadah kecil) merupakan tonggak awal berkembangnya umat Buddha di Kota Jayapura.

Perkembangan umat Buddha yang semakin banyak, sehingga cetiyah yang dijadikan tempat melaksanakan ibadah tidak lagi bisa menampung umat Buddha yang datang melaksanakan ibadah. Melihat kondisi ini maka beberapa orang dari kalangan umat Buddha memprakarsai berdirinya vihara. Maka pada tahun 1985 mendirikan yayasan Buddha Darma Jayapura sebagai modal awal dalam rangka mewujudkan pembangunan vihara beberapa orang yang menyumbangkan tanahnya sebagai tempat lokasi pembangunan diantaranya, Sun Cong Gie; A Sam; dan lie Ko Fat. Kemudian pada tanggal 19 Nopember 1989 sebuah vihara yang diberi nama vihara Arya Darma berhasil diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Provinsi Irian Jaya.

Kemudian pada tahun 2005 dibangun lagi satu yaitu vihara Buddha maitreya di Entrop. Dan cetiya Avalokitesvara pada tahun 2007 (Haryanto, 2012:1).

Menurut data terakhir pada kantor Kemenag Kota Jayapura penganut agama Buddha sebanyak 1863 orang yang tersebar pada 5 distrik yang ada dalam wilayah Kota Jayapura, dengan jumlah yang tidak merata. Jumlah yang paling banyak berada di distrik Jayapura Selatan sebanyak 725 orang; distrik Jayapura Utara sebanyak 683 orang; distrik Abepura sebanyak 357 orang; distrik Heram sebanyak 89 orang; dan yang paling sedikit berada di distrik Muara Tami yang berjumlah hanya 5 orang.

Fenomena yang cukup menarik adalah bahwa penganut agama Buddha di Kota Jayapura semuanya adalah pendatang, diantaranya adalah etnis Tionghoa, Jawa, dan orang-orang dari Nusa Tenggara Barat. Bahkan menurut Aryo penganut agama Buddha di Kota Jayapura sebahagian besar atau sekitar 70 % berasal dari Nusa Tenggara Barat. Data ini diperkuat oleh keterangan dari TS Haryanto, yang menjabat sebagai penyelenggara bimas Buddha pada Kementerian Agama Kota Jayapura, banyaknya orang Nusa Tenggara Barat datang mencari pekerjaan pada pengusaha Buddhis. Kemudian lama kelamaan yang sudah bekerja memanggil teman-temannya datang bekerja di Kota Jayapura (wawancara dengan TS Haryanto tanggal 10 April 2013 di Kota Jayapura).

Penganut agama Buddha tersebut telah memiliki sarana ibadah berupa vihara sebanyak 3 buah, yakni vihara Arya Dharma Jayapura, berdiri 1989 yang terletak di jalan Abepura Entrop Kelurahan Vim Kotaraja; Vihara Buddha Maitreya Jayapura berdiri tahun 2005 yang terletak di jalan Kelapa Dua Entrop nomor 18; dan vihara Avalokitesvara Jayapura, berdiri tahun 2007 yang terletak di jalan baru Kelapa Dua Entrop. Masing-masing vihara tersebut dibina oleh rohaniawan setingkat pandita. Perlu dijelaskan bahwa rohaniawan dalam agama Buddha mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah *bhikkhu* untuk laki-laki, dan *bhikkhuni* untuk perempuan. Kemudian setingkat dibawah bhikhu/I adalah *samanera* untuk laki-laki, dan *samaneri* untuk perempuan. Dan tingkat rohaniawan terendah disebut *pandita*. Ketiga kategori atau tingkatan rohaniawan agama Buddha yang terdapat di Kota Jayapura barulah rohaniawan pada tingkat pandita yang berjumlah 7 orang, terdiri atas laki-laki 4 orang, dan perempuan sebanyak 3 orang. Ketuju orang pandita tersebut tersebar pada tiga vihara yang ada di Kota Jayapura, dengan

rincian sebagai berikut: empat orang untuk arya darma, dua orang di vihara Maitreya, sedangkan di cetiya Avalokitesvara satu orang.

Meskipun rohaniawan tingkat bikhu/bikhuni atau samanera/samaneri belum ada di Kota Jayapura, namun pada waktu-waktu tertentu umat Buddha di Kota Jayapura sering mengundang bikhu/bikhuni atau samanera/samaneri untuk memberikan pembinaan umat. Sebagai contoh pada saat penelitian ini dilaksanakan seorang bikhu yang bernama Feryananda dari Jakarta untuk memberikan pengajaran Buddha dan memberikan khutbah pada saat kebaktian hari minggu tanggal 14 April 2013.

Selain sarana ibadah, tersedia pula sarana pendidikan sebanyak dua buah berupa sekolah minggu Buddhis. Kedua sarana pendidikan tersebut terdapat pada vihara Arya Dharma satu buah. Sekolah minggu yang ada di vihara ini membina siswa sebanyak 105, yang dibina oleh guru pembina sebanyak 12 orang. Sekolah minggu Buddhis lainnya terdapat pada vihara Buddha Maitreya. Di sekolah ini membina siswa sebanyak 45 orang, dengan guru pembina sebanyak 5 orang. Di samping, lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah minggu Buddhis tersebut di atas, umat Buddha di Kota Jayapura terbentuk pula organisasi keagamaan, seperti, yayasan Buddha Dharma Jayapura; Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha (LPKB); Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia; dan Majelis I Kuan Tou Indonesia (Mikti).

### **Pelayanan Kementerian Agama Kota Jayapura**

Sejarah dan strukturnya Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura dibentuk berdasarkan SK Menteri Agama No 250 tahun 1994 tanggal 16 Juli 1994, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama (Kementerian Kota Jayapura, 2010:1). Dengan Typologi 1 M berdasarkan KMA: 373 Tahun 2010 Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 1 Kepala Kantor; 1 Kepala Subbag TU; 5 Kasi; dan 3 penyelenggara. Salah satu struktur penyelenggara adalah penyelenggara Bimas Buddha, yang dibentuk pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 tahun 2002. Dengan terbentuknya struktur baru tersebut, maka pelayanan terhadap penganut agama Buddha dapat lebih ditingkatkan. Apalagi Penyelenggara Bimas Buddha telah menetapkan visinya sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Buddha Kota Jayapura yang taat

beragama, rukun, maju sejahtera dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam Negara kesatuan Republik Indonesia”. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi yaitu:

- a. Meningkatkan penghayatan Saddha (keyakinan), Bhakti (penghormatan), Sila (moral yang baik) dan etika keagamaan Buddha.
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama Buddha.
- c. Meningkatkan tri kerukunan hidup beragama
- d. Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana keagamaan
- e. Meningkatkan peran lembaga agama Buddha dan yayasan Buddhis sebagai mitra kerja dibidang agama untuk kemajuan bangsa
- f. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agama Buddha
- g. Menciptakan suasana harmonis dan rukun
- h. Meningkatkan mutu sumber daya manusia (tenaga teknis keagamaan)
- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Berdasarkan visi misi tersebut Kementerian Agama Kota Jayapura via Penyelenggara Bimas Buddha memberikan beberapa bentuk pelayanan terhadap penganut agama Buddha diantaranya:

#### **Bantuan Terhadap Vihara**

Seperti telah disebutkan pada pembahasan yang lalu bahwa umat Buddha di Kota Jayapura memiliki tiga buah rumah ibadah, yakni vihara Arya Darma, vihara Maitreya, dan cetya Avalokitesvara. Ketiga rumah ibadah tersebut telah terdaftar pada kantor Kemenag Kota Jayapura, dan secara berkala mendapat bantuan dana untuk renovasi. Pemberian bantuan renovasi tersebut tercantum dalam program kerja penyelenggara bimas Buddha, misalnya dalam anggaran tahun 2010 dan 2011 vihara Arya Darma, dan vihara Buddha Maitreya, masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp.20.000.000. Sedangkan cetya Avalokatesvara tidak mendapat bantuan. Kemudian pada tahun anggaran 2011, ketiga rumah ibadah mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp.20.000.000. (Penyelenggara Bimas Buddha Kemenag Kota Jayapura, 2010:10).

Selain bantuan pemeliharaan ketiga rumah ibadah tersebut, pengurus yayasan ketiga vihara tersebut juga mendapatkan bantuan kesejahteraan dari kemenag. Besarnya bantuan yang diberikan kepada pengurus vihara tersebut sebesar Rp. 1.600.000 pertahun untuk setiap orang. Kemudian

sejak tahun anggaran 2013 jumlah bantuan tersebut meningkat menjadi Rp.3.600.000 pertahun untuk setiap orang.

Meskipun pada setiap vihara terdapat beberapa orang pengurus, namun yang diberikan bantuan kesejahteraan hanya satu orang dari setiap vihara. Menurut TS Haryanto, karena keterbatasan dana, maka pemberian bantuan kepada pengurus diberikan secara bergilir setiap tahun dan berdasarkan usulan dari Yayasan vihara.

#### **Pelayanan di Bidang Pendidikan**

Umat Buddha di Kota Jayapura, selain memiliki vihara juga memiliki sekolah minggu Buddhis yang terdapat di setiap vihara. Dari ketiga vihara yang ada, hanya dua diantaranya yang memiliki sekolah minggu Buddhis, yakni vihara Arya Darma, dan vihara Buddha Maitreya. Sekolah minggu Buddhis Arya Darma membina siswa sebanyak 99 orang siswa, dan dibina 12 orang guru, yang semuanya non PNS. Kemudian sekolah minggu Buddhis yang terdapat di vihara Buddha Maitreya membina siswa sebanyak 41 orang, yang dibina 5 orang guru non PNS. Kedua sekolah tersebut membina siswa mulai tingkat play group, *adhi sekha*, *cula sekha*, dan *maha sekha*. pelayanan yang diberikan oleh Kemenag terhadap kedua sekolah minggu Buddhis tersebut berupa penyediaan tenaga guru bekerjasama pihak yayasan vihara. Bantuan lain yang diberikan berupa buku-buku pelajaran agama. Selain kedua bentuk bantuan tersebut Kemenag juga memberikan bantuan dana untuk kegiatan perlombaan antar vihara yang dilaksanakan setiap tahun. Beberapa bentuk perlombaan yang dilaksanakan setiap tahun diantaranya Sippa Damma Samajja. Sippa Damma Samajja merupakan kegiatan lomba cerdas cermat tentang kemahiran pengetahuan ajaran Buddha Gautama. Kegiatan ini diadakan sampai tingkat nasional.

Untuk merealisasikan kegiatan tersebut Kemenag Kota Jayapura menganggarkan bantuan secara rutin setiap tahun. Menurut TS Haryanto bantuan untuk pelaksanaan kegiatan ini diprogramkan setiap tahun dan ini termasuk salah satu program unggulan penyelenggara bimas Buddha. Sebagai gambaran untuk tahun 2012 Kementerian Agama Kota Jayapura memberikan bantuan kepada sekolah minggu Buddhis Arya Darma sebesar Rp.25.000.000 dan sekolah minggu Buddhis vihara Buddha Maitreya sebesar Rp.12.500.000. (Penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Jayapura, 2012:19).

Selain memberikan bantuan dana operasional, Kementerian Agama juga memberikan bantuan berupa buku pelajaran agama Buddha yang disalurkan kepada lembaga sekolah minggu Buddhis, dan beberapa sekolah yang memiliki murid atau siswa yang beragama Buddha. Buku mata pelajaran agama Buddha yang diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

### **Pelayanan Penyiaran agama**

Ada dua misi yang diemban oleh penyelenggara Bimas Buddha kantor Kemenag Kota Jayapura yang berkaitan dengan penyuluhan keagamaan yakni. 1) meningkatkan penghayatan saddha (keyakinan), bhakti (penghormatan), sila (moral yang baik) dan etika keagamaan Buddha; dan 2) meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama Buddha.

Terkait dengan misi tersebut di atas, maka Kementerian Agama Kota Jayapura bekerja sama dengan beberapa tenaga penyuluh agama dan rohaniawan yang bertugas memberikan penyiaran agama kepada umat Buddha. Jumlah tenaga penyuluh yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kota Jayapura sebanyak 12 orang, dengan kategori penyuluh muda sebanyak 7 orang, dan penyuluh madya 5 orang. Kedua belas penyuluh tersebut semuanya berstatus tenaga non PNS. yang bertugas melakukan penyiaran agama kepada umat yang ada di Kota Jayapura, baik yang bersifat kelompok, maupun yang bersifat umum. Sebagai contoh Upi Kalyanidevi memberikan penyiaran agama kepada kelompok wanita Buddhis. Sutono memberikan penyiaran agama kepada kelompok pemuda Buddhis. Kemudian yang bersifat umum, seperti umat Buddha Abepura, yang dilaksanakan oleh Suanto, dan umat Buddha vihara Arya Darma yang dilaksanakan oleh Upi Dhiravati Dhesty. Dalam menjalankan tugasnya penyuluh mendapat tunjangan operasional dari Kementerian Agama sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan mulai tahun anggaran 2013 ini tunjangan operasional para penyuluh dan rohaniawan lainnya ditingkatkan menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun perorang.

Selain tenaga penyuluh agama, dalam kalangan umat Buddha di Kota Jayapura memiliki rohaniawan sebanyak 7 orang, yang semuanya dalam tingkat Pandita. Sebagaimana diketahui bahwa rohaniawan dalam agama Buddha mempunyai

tiga tingkatan, yakni *pandita*, kemudian tingkatan di atasnya adalah *samanera* untuk laki-laki, dan *Samaneri* untuk perempuan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah *Bhikkhu* untuk laki-laki, dan *Bhikkhuni* untuk perempuan. Menurut pak Haryanto, untuk mencapai tingkatan *bhikkhu* atau *bhikkhuni*, seseorang menjalani 272–300 aturan, dan salah satunya adalah sanggup tidak kawin atau membujang.

Bentuk pelayanan lainnya yang diberikan oleh Kementerian Agama yang berkaitan dengan penyiaran agama adalah yang berkaitan dengan perayaan hari-hari besar agama Buddha seperti perayaan Waisak yang diperingati secara bersama dari tiga vihara yang ada di Kota Jayapura.

Kemudian penyiaran agama dalam bentuk mimbar agama Buddha bekerjasama dengan RRI Kota Jayapura yang dilaksanakan setiap hari rabu jam 15, dengan durasi waktu selama 15 menit. Kegiatan diisi oleh tenaga penyuluh agama maupun rohaniawan agama Buddha secara bergantian. Tapi kegiatan mimbar agama Buddha di RRI, sejak tahun 2012 yang lalu tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut (TS. Haryanto, wawancara, 9 April 2013).

Meskipun Kementerian Agama Kota Jayapura telah melakukan pelayanan terhadap penganut agama, baik pelayanan yang sifatnya bantuan materil, maupun pelayanan non materil. Namun demikian dalam memberikan pelayanan belum bisa dilakukan secara maksimal, Hal ini disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi berupa:

*Masalah dana*, masalah dana merupakan salah satu kendala yang dirasakan dalam memaksimalkan pelayanan. Hal ini terkait dengan masih terbatasnya dana atau anggaran dari departemen sehingga beberapa hal yang telah diprogramkan sebelumnya tidak bisa direalisasikan, misalnya kami telah memprogramkan mimbar agama Buddha bekerja sama dengan TV Papua. Untuk menyikapi hal ini menurut TS Haryanto, maka kami membuat program unggulan atau skala prioritas dan program non-unggulan.

*Keterbatasan SDM*, terbatasnya SDM juga merupakan kendala dalam melakukan pelayanan. Hal ini disebabkan karena pada penyelenggara bimas Buddha yang melakukan pelayanan hanya satu orang, yakni kepala penyelenggara tanpa didampingi oleh staf. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2002 yang lalu ketika mulai terbentuknya struktur penyelenggara Bimas Buddha pada Kantor Kemenag Kota Jayapura. Sebenarnya

pihak Kemenag telah beberapa kali mengusulkan pengangkatan PNS pada bidang penyelenggara bimas Buddha, namun sampai saat ini belum ada realisasi.

Selain faktor keterbatasan dana dan SDM, faktor lainnya yang dirasakan menghambat adalah sarana dan prasarana, seperti ruangan yang sempit yang hanya layak menampung dua orang. Kemudian belum adanya kendaraan dinas yang dipakai dalam melakukan operasional pelayanan.

## PENUTUP

Keberadaan penganut agama Buddha di Kota Jayapura sudah berlangsung sejak zaman Belanda bercokol di tanah Papua (dulu Irian Barat) sekitar tahun 60-an yang lalu. Jumlah umat Buddha yang tercatat pada kantor BPS dan Kantor Kemenag Kota Jayapura sebanyak 1863 orang (0,63 %) dari jumlah penduduk Kota Jayapura. Umat Buddha yang ada di Kota Jayapura sebahagian etnis cina. Selain etnis cina sebahagian lainnya adalah orang pribumi, yang melakukan migrasi ke Kota Jayapura, diantaranya dari Sulawesi, Sumatra, Jawa, dan dari Nusa Tenggara Barat.

Meskipun termasuk minoritas dari segi jumlah penganut, namun demikian dari pihak Kemenag memberikan perhatian untuk melakukan pelayanan. Hal ini ditandai dengan dibentuknya struktur penyelenggara bimas Buddha pada kantor Kemenag Kota Jayapura sejak tahun 2002 yang lalu.

Beberapa bentuk pelayanan Kementerian Agama terhadap penganut agama Buddha di Kota Jayapura diantaranya, bantuan pemeliharaan atau renovasi dan melakukan pendataan terhadap rumah ibadah atau vihara. Kemudian pelayanan terhadap lembaga pendidikan berupa pemberian dana operasional sekolah minggu Buddhis. Dan bantuan pengadaan guru bekerjasama dengan pihak yayasan masing-masing vihara, serta pengadaan buku-buku mata pelajaran. Dan pelayanan dalam bentuk penyiaran agama Buddha, bekerja sama dengan penyuluh agama dan rohaniawan agama Buddha untuk melakukan penyuluhan agama terhadap umat Buddha, baik yang sifatnya penyuluhan langsung kemasyarakatan, maupun melalui media elektronik bekerja sama dengan RRI Kota Jayapura dalam bentuk mimbar agama Buddha yang dilaksanakan setiap hari Rabu sore. Di samping itu, Kementerian Agama juga memberikan pelayanan dalam rangka

memperingati hari-hari besar agama Buddha seperti perayaan hari Waisak yang diperingati setiap bulan Mei.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 1) Kepala Balai Litbang Agama Makassar; 2) tim redaksi Alqalam; 3) rekan-rekan peneliti; dan 4) seluruh informan atas segala bantuannya sehingga tulisan ini dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrun, Pat, dkk. 2008. *Optimalisasi Pelayanan Keagamaan Departemen Agama*. Makassar: Indobis Publishing.
- BPS. Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2012.
- Haryanto, TS. 2012. *Sejarah Perkembangan Agama Buddha di Kota Jayapura*. Maklah tidak diterbitkan.
- [http://balitbang.diklat.kemenag.go.id.php?option=com\\_content&View=article&id=166:survey-pendidikan%20keagamaan-kristen-katolik-hindu-budha-dan%20khonghucu-&catid=61:pendidikan%20keagamaan&Itemid=123](http://balitbang.diklat.kemenag.go.id.php?option=com_content&View=article&id=166:survey-pendidikan%20keagamaan-kristen-katolik-hindu-budha-dan%20khonghucu-&catid=61:pendidikan%20keagamaan&Itemid=123), diakses 26 Desember 2012
- <http://buddhazine.com/2011/12/23/bps-jumlah-umat-buddha-di-indonesia-meningkat>, diakses 20 Mei 2013.
- Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat 2010-2014. Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Jayapura. *Laporan Tahunan 2010,2011,2012*.
- Ratminto dan Atik SP. 2007. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Mutu*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010-2014. Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [www.bimasbuddha.kemenag.go.id](http://www.bimasbuddha.kemenag.go.id), diakses tanggal 1 Mei 2013.